

Sadar Dokumen, Tertib Administrasi Edukasi Kependudukan Bagi Masyarakat Desa Banjar Agung, Kecamatan Cipocok, Kota Serang

Ema Farida¹ Turnya², Susanto³

^{1,2,3}. Universitas Pamulang

Email: susanto@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Sadar Dokumen, Tertib Administrasi: Edukasi Kependudukan bagi Masyarakat Desa Banjar Agung, Kecamatan Cipocok, Kota Serang” dilaksanakan oleh Dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pamulang pada tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan serta ketertiban administrasi dokumen kependudukan, termasuk Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum, penyampaian materi edukatif, diskusi, dan konsultasi terkait permasalahan administrasi kependudukan yang dihadapi masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi, prosedur, dan pentingnya pembaruan dokumen kependudukan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi lebih sadar hukum serta mendukung tertib administrasi kependudukan di Desa Banjar Agung.

Kata kunci: Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan, Kesadaran Hukum, Penyuluhan Hukum, Pengabdian kepada Masyarakat.

ABSTRACT

A Community Service activity themed "Document Awareness and Administrative Order: Population Administration Education for the Residents of Banjar Agung Village, Cipocok District, Serang City" was conducted by lecturers from the Bachelor of Laws program at Pamulang University from April 30 to May 1, 2026. The activity aimed to enhance public understanding and awareness regarding the importance of possessing and maintaining orderly population administration documents—such as Family Cards, Resident Identity Cards, birth certificates, and other civil registration documents. The implementation methods included legal outreach, the presentation of educational material, discussions, and consultations regarding population administration issues faced by the community. The results indicated an increase in public understanding concerning the functions, procedures, and importance of keeping population documents up-to-date in an orderly manner and in compliance with legal regulations. This activity is expected to foster greater legal awareness among the community and support orderly population administration in Banjar Agung Village.

Keywords: Population Administration, Population Documents, Legal Awareness, Legal Outreach, Community Service.

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan

dokumen lainnya, tidak hanya berfungsi sebagai bukti identitas, tetapi juga menjadi dasar dalam memperoleh berbagai pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta pelayanan hukum dan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk memiliki, menyimpan, dan memperbarui dokumen

kependudukan secara tertib perlu terus ditingkatkan.

Dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara optimal pentingnya administrasi kependudukan, prosedur pengurusan dokumen, maupun konsekuensi yang dapat timbul apabila data kependudukan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya edukasi yang mudah dipahami dan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Desa Banjar Agung, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh Dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pamulang pada tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat Desa Banjar Agung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya dokumen kependudukan, mampu mengurus administrasi secara tepat, serta meningkatkan kesadaran hukum dalam mendukung terciptanya tertib administrasi kependudukan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “*Sadar Dokumen, Tertib Administrasi: Edukasi Kependudukan bagi Masyarakat Desa Banjar Agung, Kecamatan Cipocok, Kota Serang*” dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei 2026 oleh Dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pamulang. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya dokumen serta tertib administrasi kependudukan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan konsultasi mengenai permasalahan administrasi kependudukan. Materi yang diberikan meliputi pengertian administrasi kependudukan, jenis dan fungsi dokumen kependudukan, pentingnya kesesuaian data, prosedur pengurusan dokumen, serta kewajiban masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan.

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan edukasi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai kedudukan dokumen kependudukan dalam

kehidupan sehari-hari. Masyarakat memperoleh penjelasan bahwa dokumen kependudukan bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian penting dari identitas dan kepastian hukum seseorang. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia (UU No. 24 Tahun 2013).

Administrasi kependudukan memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Data dan dokumen kependudukan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ketepatan dan kesesuaian data penduduk perlu dijaga secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran bahwa setiap perubahan data, seperti perubahan alamat, status perkawinan, kelahiran, maupun kematian, perlu dilaporkan dan dicatat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan PkM, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya memastikan kesesuaian data pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Ketidaksesuaian data dapat menimbulkan hambatan ketika masyarakat mengakses pelayanan publik atau melakukan berbagai kegiatan yang memerlukan pembuktian identitas. Dengan demikian, tertib administrasi kependudukan dapat dipahami sebagai bentuk pemenuhan hak sekaligus tanggung jawab masyarakat.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah perkembangan pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Pemerintah telah menyediakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2023 (Permendagri No. 7 Tahun 2019; Permendagri No. 2 Tahun 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang memadai agar dapat memanfaatkan mekanisme pelayanan yang tersedia secara efektif dan sesuai prosedur.

Selain aspek pelayanan, pendokumentasian administrasi kependudukan juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi. Permendagri

Nomor 104 Tahun 2019 mengatur mengenai pendokumentasian administrasi kependudukan, sedangkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 mengatur formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan (Permendagri No. 104 Tahun 2019; Permendagri No. 109 Tahun 2019).



Gambar 1 Tim Pelaksana PKM

Berdasarkan diskusi selama kegiatan, masyarakat menunjukkan antusiasme dalam menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan dokumen kependudukan dan tata cara pengurusannya. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung dapat menjadi sarana untuk menjembatani pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum dengan kebutuhan administratif yang mereka hadapi sehari-hari.



Gambar 2 Pelaksanaan PKM

Kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya pendekatan edukatif dalam meningkatkan kesadaran hukum. Masyarakat tidak hanya diberikan informasi mengenai aturan, tetapi juga diarahkan untuk memahami manfaat praktis dari tertib administrasi. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam memeriksa kelengkapan

dan kesesuaian dokumen kependudukannya serta segera melakukan pembaruan apabila terdapat perubahan data.

Dengan demikian, kegiatan PkM di Desa Banjar Agung memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat di bidang administrasi kependudukan. Keberlanjutan kegiatan serupa diperlukan agar kesadaran masyarakat tidak berhenti pada pemahaman, tetapi berkembang menjadi kebiasaan tertib administrasi. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan instansi kependudukan juga penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, mudah dipahami, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi, prosedur, dan pentingnya pembaruan dokumen kependudukan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi lebih sadar hukum serta mendukung tertib administrasi kependudukan di Desa Banjar Agung

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Yayasan Sasmita Jaya, Desa Banjar Agung, dan semua yang terlibat dalam kegiatan PkM. Dukungan pihak terlibat luar biasa dan sangat berarti bagi kesuksesan acara ini. Semoga kerjasama ini terus berkembang untuk memberikan dampak positif yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, I. F., Utami, T. W., Rilvandri, Q. P., & Suherdi, A. (2024). Sistem pakar tertib administrasi kependudukan Desa Katonsari Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode forward chaining systems. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.53860/losari.v6i1.199>.
- Aysah, I. N., Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2023). Optimalisasi pemuktahiran data kependudukan melalui Program KALIMASADA di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3).
- Hidayah, D. D. (2020). Kualitas pelayanan publik: Studi pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. *Dinamika: Jurnal*

- Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1).
<https://doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3260>
- Isti'anah, S. N., & Arif, L. (2023). Pendampingan pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka optimalisasi Program KALIMASADA di Kelurahan Kendangsari. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 293–298.
- Mirlana, D. E., Sunarso, S., Halim, A., Sahuti, A. K., Widyarningsih, A. Z., & Khasanah, U. (2023). Membangun gerakan sadar dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 409–419.
<https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3323>.
- Muriawan, A., Subarkah, & Sulistyowati. (2021). Optimalisasi pelayanan publik: Kajian layanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan Kota Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(1).
<https://doi.org/10.24176/sk.v21i1.5675>.
- Nafsiatun. (2019). Peningkatan kualitas data kependudukan melalui program kemitraan masyarakat tertib administrasi kependudukan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*.
- Nurisnaeni, N., Jamalong, A., & Khaer, N. (2025). Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan. *Jurnal Tomalebbi*, 12(3).
<https://doi.org/10.56680/jt.v12i3.73717>.
- Nurwati, R. N. (2022). Pelatihan registrasi penduduk oleh aparat desa/kelurahan dalam upaya tertib administrasi kependudukan. *Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*.
- Sari, A. T., Rahmah, A. M., & Utami, N. A. T. (2022). Kesadaran hukum masyarakat terhadap manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan administrasi kependudukan: Studi di Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. *Soedirman Law Review*, 4(2).
<https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.2.178>.